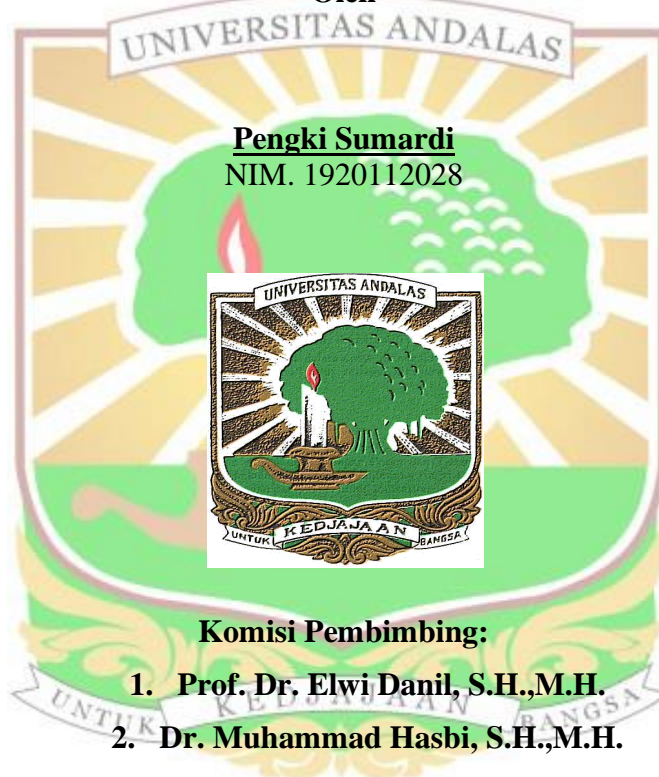


TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN No.33/Pid.B/2021
Pn.PMN An.Arief Budiman)**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
PENGADAAN BARANG**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN No.33/Pid.B/2021
Pn.PMN An.Arief Budiman)**

**(Pngki Sumardi,1920112028, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 123 Halaman, 2023)**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang PENGGELAPAN DENGAN ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman)”, permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi, dengan rumusan masalah bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Arief Budiman dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Kasus Posisi Tindak Pidana Penggelapan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dalam pengadaan Barang dan Jasa Oleh Arief Budiman?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan maupun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.

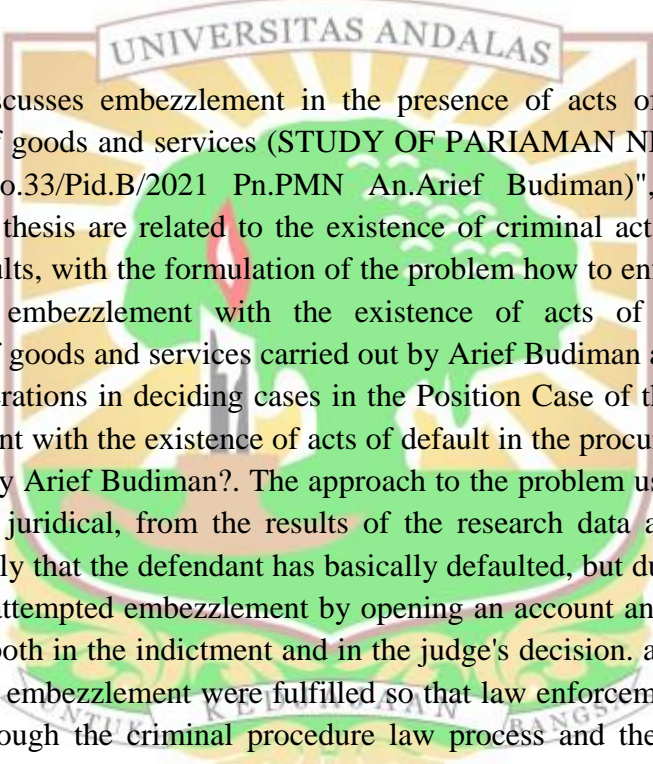
Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan Perselisihan Prayudisial (*prejudisieel geschill*).

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF
EMBRACTION WITH THE EXISTENCE OF BREACH IN THE
PROCUREMENT OF GOODS

(STUDY OF PARIAMAN NEGERI COURT DECISION No.33/Pid.B/2021
Pn.PMN An.Arief Budiman)

(Pengki Sumardi, 1920112028, Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 123 Pages, 2023)

ABSTRACT



This thesis discusses embezzlement in the presence of acts of default in the procurement of goods and services (STUDY OF PARIAMAN NEGERI COURT DECISION No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman)", the problems studied in this thesis are related to the existence of criminal acts embezzlement related to defaults, with the formulation of the problem how to enforce the law on the crime of embezzlement with the existence of acts of default in the procurement of goods and services carried out by Arief Budiman and what are the judges' considerations in deciding cases in the Position Case of the Criminal Act of embezzlement with the existence of acts of default in the procurement of goods and Services By Arief Budiman?. The approach to the problem used in this study is sociological juridical, from the results of the research data and analysis are obtained, namely that the defendant has basically defaulted, but during the default period he has attempted embezzlement by opening an account and diverting it so that the act is both in the indictment and in the judge's decision. and the elements of the crime of embezzlement were fulfilled so that law enforcement efforts were carried out through the criminal procedure law process and the defendant was found guilty. In the judge's consideration, the defendant was found guilty of committing the crime of embezzlement in violation of Article 372 of the Criminal Code so that the defendant was found guilty and sentenced to 3 years and 8 months in prison. This study recommends that law enforcement officers handle cases that have a link between civil law and criminal law so that they handle cases carefully and thoroughly.

Keywords: Embezzlement, Default and Prayudicial Disputes (prejudisieel geschil).